

KETEPATAN WAKTU PENATAUSAHAAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Ahmad Mu'am¹, Nurliah Nurdin²

¹Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Kota Tangerang Selatan, Indonesia

²Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga Administrasi Negara, Indonesia

muam99@gmail.com¹, nurliahnurdin@stialan.ac.id²

ABSTRAK

Abstrak: Pemerintah daerah harus menerapkan tata pemerintahan yang baik, khususnya dalam akuntabilitas pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah wajib menyajikan baik ketepatan waktu penyelenggaraan anggaran daerah maupun ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah pertanggungjawaban pemerintahan. Pencapaian karakteristik ketepatan waktu dalam penyelenggaraan anggaran daerah dan pelaporan keuangan pemerintah daerah memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, komitmen organisasi yang tinggi, dan pemanfaatan perangkat pendukung. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan perangkat pendukung terhadap ketepatan waktu APBD dan pelaporan keuangan pemerintah. Survei dilakukan di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan atas nama pemerintah pusat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah dan pemerintah daerah terpilih melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan perangkat pendukung secara sendiri-sendiri tidak berpengaruh pada ketepatan waktu Administrasi APBD dan pelaporan keuangan daerah. Namun demikian secara simultan sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan perangkat pendukung berpengaruh pada ketepatan waktu penatausahaan anggaran pemerintah daerah dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Penatausahaan; Anggaran Pemerintah Daerah; Pelaporan Keuangan.

Abstract: Regional government should implement good governance, particularly in governmental accountability. Based on Government Regulation No. 71/2010 about Governmental Accounting Standard and Government Regulation No. 58/2005 about Regional Financial Management, a regional government must present both the regional budget administration timeliness and the regional government financial statement reporting timeliness governmental accountability. Achieving timeliness characteristics on regional budget administration and regional government financial reporting requires high-quality human resources, high organizational commitment, and supporting devices utilization. This research tests the effect of human resources, organizational commitment, and supporting devices on regional budget and government financial reporting timeliness. A survey was conducted at the Directorate General Fiscal Balance Ministry of Finance on behalf of the central government responsible for the regional financial management and the selected regional government through Dinas or Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. This study shows that human resources, organizational commitment, and supporting tools individually do not affect the timeliness of APBD administration and regional financial reporting. However, simultaneously human resources, organizational commitment, and supporting instruments jeopardize the timeliness of local government budget administration and local government financial reporting.

Keywords: Management; Budget Administration; Financial Reporting.



Article History:

Received: 30-08-2021

Revised : 05-09-2021

Accepted: 06-09-2021

Online : 11-09-2021



*This is an open access article under the
CC-BY-SA license*

A. LATAR BELAKANG

Kebijakan otonomi daerah dimulai dengan ditetapkannya paket Undang-Undang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat secara makro maupun mikro bagi perekonomian daerah dengan menumbuhkembangkan sektor riil, mendorong upaya pemberdayaan masyarakat, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Implementasi otonomi daerah berlandaskan dengan keinginan untuk mengubah cara pandang dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang mengedepankan pendekatan dengan corak sentralistik pada masa orde baru menjadi corak desentralistik (Akbal, 2016).

APBD yang tidak disahkan sesuai peraturan perundang-undangan akan memberikan dampak kurang optimalnya dalam pelaksanaan keuangan daerah. Oleh karena itu ketidakefektifan pemanfaatan dana APBD bukan saja akibat pemilihan proyek yang keliru, sehingga habis hanya untuk keperluan belanja pegawai tanpa ada prioritas buat anggaran pembangunan yang produktif, namun juga akibat Raperda yang menjadi dasar pengeluaran APBD tersebut tidak selesai tepat waktu. Apabila APBD bisa tepat waktu serta tepat sasaran, maka APBD bisa menjadi pelumas kegiatan perekonomian dan pembangunan di daerah demi kesejahteraan rakyat. Aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Suspitasi et al., 2018).

Penetapan APBD tepat waktu mempercepat proses turunnya dana dari pemerintah ke masyarakat. Penetapan APBD merupakan bagian penatausahaan keuangan daerah. Dana yang diturunkan pemerintah melalui program kegiatan, diharapkan dapat memicu peredaran uang di masyarakat yang berimplikasi pada peningkatan daya beli dan pertumbuhan ekonomi. Realisasi belanja per 11 Juni 2021, meliputi realisasi belanja provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia baru mencapai 24,41%, dengan rincian realisasi APBD provinsi sebesar 26,85% dan realisasi APBD kabupaten/kota sebesar 23,22%. Pada pertengahan tahun, seharusnya realisasi belanja daerah sudah mencapai minimal 40%-50%. Pemerintah telah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 sebesar 5%. Meski pada kuartal pertama terkonsentrasi sebesar 0,74%, namun sesuai dengan target pemerintah, pertumbuhan ekonomi akan naik di kuartal kedua dengan target pertumbuhan sebesar 7%. Menurut Mendagri, target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai apabila pemerintah pusat dan daerah bekerjasama dalam melakukan realisasi belanja agar pandemi COVID-19 dapat terselesaikan, dan ekonomi kembali bangkit (Kemenkeu, 2021).

Penetapan APBD sangat berpengaruh pada pelaksanaan anggaran. Secara simultan maupun parsial perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang jasa, komitmen manajemen dan lingkungan birokrasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) (Gagola et al., 2017). Penyebab rendahnya tingkat serapan anggaran pada awal tahun anggaran yang dapat dikelompokkan menjadi tiga faktor yaitu: (1) Faktor Sumber Daya Manusia, (2) Faktor Administrasi, dan (3) Faktor Kebijakan (Kusuma Negara et al., 2018). Pemerintah daerah merupakan agen dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah dipandang sebagai satu set relasi sosial yang mempunyai kontribusi dalam representasi (Ropii, 2015).

Salah satu amanat dalam pengelolaan keuangan negara adalah pemerintah berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD.

Hal ini lebih lanjut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Mu'am, 2015). Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah memahami kondisi keuangannya. Suatu keniscayaan bahwa permintaan pelayanan publik akan semakin meningkat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab dalam pelayanan publik (McDonald, 2017).

Selain itu dalam perspektif, APBD adalah keputusan politik yang ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk dilaksanakan oleh aparat birokrasi daerah. Sedangkan dalam perspektif makro yaitu tata pemerintahan demokrasi, APBD sebagai kebijakan anggaran daerah merupakan mandat politik warga (*citizen political mandate*) atas sumberdaya publik yang diamanatkan kepada lembaga pemerintahan daerah (eksekutif dan legislatif) sebagai pemilik otoritas pengelolaan anggaran. Sifat otoritatif tersebut hanya berlaku sepanjang pemerintah daerah mampu melaksanakan alokasi atau distribusi anggaran berdasarkan nilai-nilai kepentingan warga (Riyanto, 2012). Sedangkan fragmentasi politik dan tahun sejak pemilu tidak berpengaruh terhadap perubahan anggaran (Purwanto, 2016).

Terkait dengan Administrasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada bagian Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa agar laporan keuangan dapat memenuhi tujuannya diperlukan karakteristik kualitas laporan keuangan, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Agar relevansi ini dapat tercapai, maka laporan keuangan harus disajikan tepat waktu (*timeliness*). Kerangka konseptual menyatakan bahwa pelaporan keuangan seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam rangka menilai akuntabilitas dan kebijakan pengambilan keputusan (Pamungkas, 2012).

Demi terselenggaranya ketepatan waktu pelaporan keuangan yang baik, maka harus ada sumber daya manusia yang berkualitas, pemanfaatan teknologi yang baik dalam penggunaan sistem pelaporan keuangan dan pengendalian internal. Variabel sumber daya manusia dan perangkat pendukung memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap keberhasilan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (Safitri, 2017). Pengaruh Komitmen Organisasi dan Sistem Informasi Akuntansi sebagai pendukung (*supplementary*) terhadap ketepatan waktu Pelaporan Keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah (Eristanti et al., 2019).

Secara simultan maupun parsial perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang jasa, komitmen manajemen dan lingkungan birokrasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) (Gagola et al., 2017). Ada enam faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran dengan urutan prioritas faktor dari keenam faktor tersebut yaitu: (1) faktor perencanaan yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 24,31%, (2) faktor pengadaan barang/jasa yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 11,10%, (3) faktor regulasi yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 8,57%, (4) faktor internal perubahan anggaran yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 7,03%, (5) faktor administrasi yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 5,92%, dan (6) faktor SDM yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 5,56% (Widianingrum et al., 2017).

Penelitian ini ingin mengetahui apakah variabel sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan perangkat pendukung secara sendiri-sendiri apakah berpengaruh pada ketepatan waktu Administrasi APBD dan pelaporan keuangan daerah. Selain itu penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana variabel sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan Perangkat Pendukung berpengaruh secara simultan mempunyai pengaruh pada ketepatan waktu penatausahaan anggaran pemerintah daerah dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan survei kepada Dinas/Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mewakili masing-masing Wilayah Indonesia Bagian Barat, Bagian Tengah, dan Bagian Timur serta pemerintah pusat yang menangani keuangan daerah. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan mengacu pada Purposive Sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu (Sugiyono, 2019).

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, peneliti menggunakan instrumen berupa kuesioner yang diberikan kepada Pejabat Keuangan di Pemerintah Daerah maupun Pejabat yang mempunyai otoritas Keuangan Daerah di Kementerian Keuangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik *personally administered questionnaires*, yaitu kuesioner disampaikan dan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa nilai atau skor jawaban yang diberikan oleh respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2019).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa jawaban responden atas pernyataan yang disajikan dalam kuesioner. Definisi operasional untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah: Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ketepatan waktu (*timeliness*) penatausahaan APBD dan pelaporan keuangan daerah (TMLN). Instrumen ketepatan waktu Administrasi APBD dan pelaporan keuangan daerah diukur dengan instrumen yang disesuaikan dengan peraturan tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada penelitian kali ini yang menjadi variabel independen adalah kualitas sumber daya manusia (HRDQ), komitmen organisasi (COMT), dan perangkat pendukung (SUPT). Berikut ini disajikan pada Tabel 1 terkait dengan indikator masing-masing variabel independen.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Independen

Variabel	Indikator	Skala	Item
Variabel X_1 Sumber Daya Manusia (HRDQ)	a. Tingkat Pendidikan Petugas Pelaksana Penyusunan APBD dan LKPD	Ordinal	1
	b. Tingkat Keandalan Manajer/Kepala Bidang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah		2
	c. Tingkat Komptensi Pengelola Sistem Informasi Keuangan Daerah		3
	d. Tingkat Kemampuan Koodinasi antar Petugas penyusun APBD dan LKPD dalam satu tim		4

Variabel X ₂ Komitmen Organisasi (COMT)	a. Tingkat Komitmen Manajemen Puncak (Kepala Daerah) dalam mendorong penyusunan APBD dan LKPD	Ordinal	5
	b. Tingkat kontrol/pengawasan yang ketat dalam setiap tahapan penyusunan		6
	c. Tingkat standar kualitas yang ditetapkan dalam penyusunan APBD dan LKPD		7
	d. Tingkat ketaatan pada peraturan perundang-undangan (Undang-undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan Menteri/Perda/Perkada) yang menjadi dasar penyusunan		8
Variabel X ₃ Perangkat Pendukung (SUPT)	a. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Teknologi Informasi yang memadai dalam mendukung penyusunan	Ordinal	9
	b. Tingkat dukungan alokasi anggaran yang memadai dalam rangka penyusunan		10
	c. Tingkat stabilitas Sistem Keuangan Daerah yang dipergunakan dalam penyusunan		11
	d. Tingkat implementasi Standar Operating Prosedur (SOP) pada Sistem Informasi Keudangan Daerah dalam rangka penyusunan		12

Variabel independen tersebut ini diukur dengan menggunakan instrumen pertanyaan yang mengacu pada (Safitri, 2017) dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan tujuan penelitian sehingga memudahkan responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert dengan rentang nilai antara 1 sampai 5, yaitu: 1= sangat tidak setuju; 2= tidak Setuju; 3= netral; 4= setuju; dan 5= sangat setuju.

Penelitian yang mengukur variabel dengan menggunakan instrumen dalam kuesioner harus dilakukan pengujian kualitas terhadap data yang diperoleh dengan uji validitas dan reliabilitas. Uji reliabilitas dan validitas dilakukan untuk mengetahui ketepatan alat ukur dalam mengukur objek yang diteliti. Pengujian asumsi klasik dilakukan guna memenuhi asumsi regresi linear berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Pengujian asumsi klasik yang digunakan adalah Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Normalitas. Sedangkan Uji regresi linear berganda secara multivariate digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Model persamaan regresi berganda yang digunakan adalah:

$$TMLN = \alpha + \beta_1HRDQ + \beta_2COMT + \beta_3SUPT + \varepsilon \quad (1)$$

Sedangkan hipotesis yang diajukan adalah:

H₁: Sumber daya manusia (HRDQ) berpengaruh terhadap ketepatan waktu (TMLN) Administrasi APBD dan pelaporan keuangan daerah

- H₂: Komitmen organisasi (COMT) berpengaruh terhadap ketepatan waktu (TMLN) Administrasi APBD dan pelaporan keuangan daerah
- H₃: Perangkat pendukung (SUPT) berpengaruh terhadap ketepatan waktu (TMLN) Administrasi APBD dan pelaporan keuangan daerah

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan dengan mengirimkan 150 kuesioner baik secara langsung maupun melalui jasa pengiriman. Kuesioner yang kembali sebanyak 116 kuesioner sedangkan kuesioner yang layak dianalisis adalah 99 kuesioner. Berdasarkan *Descriptive Statistics* pemetaan responden menunjukkan bahwa hanya 24% yang memegang jabatan. Sedangkan dari sisi pendidikan 67% memegang gelar S-1.

Berdasarkan data dari responden, dilakukan uji Validitas dengan nilai pearson correlation yang positif dan nilai signifikansinya di bawah 0,05 untuk valid. Berdasarkan Uji Validitas, hasil perhitungan atas variabel independen (HRDQ, COMM, dan SUPT) dan variabel dependen (TMLN) menghasilkan nilai pearson correlation diatas nol dan sig. dibawah 0,05 sehingga memenuhi kriteria valid seperti pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Uji Validitas
Correlations

		TMLN_2	TMLN_3	TMLN_4	TMLN_5	TMLN_6	TMLN_7	TMLN_8	Ketepatwaktuan
TMLN_2	Pearson Correlation	1	.334 ^{**}	.289 ^{**}	.280 ^{**}	.309 ^{**}	.282 ^{**}	-.025	.597 ^{**}
	Sig. (2-tailed)		.001	.004	.005	.002	.005	.803	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
TMLN_3	Pearson Correlation	.334 ^{**}	1	.299 ^{**}	.218 ^{**}	.121	.115	.127	.507 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.001		.003	.030	.233	.256	.211	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
TMLN_4	Pearson Correlation	.289 ^{**}	.299 ^{**}	1	.291 ^{**}	.231 ^{**}	.095	.135	.622 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.004	.003		.004	.021	.351	.183	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
TMLN_5	Pearson Correlation	.280 ^{**}	.218 ^{**}	.291 ^{**}	1	.491 ^{**}	.411 ^{**}	.188	.656 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.005	.030	.004		.000	.000	.063	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
TMLN_6	Pearson Correlation	.309 ^{**}	.121	.231 ^{**}	.491 ^{**}	1	.624 ^{**}	.074	.664 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.002	.233	.021	.000		.000	.466	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
TMLN_7	Pearson Correlation	.282 ^{**}	.115	.095	.411 ^{**}	.624 ^{**}	1	.089	.597 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.005	.256	.351	.000	.000		.381	.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99
TMLN_8	Pearson Correlation	-.025	.127	.135	.188	.074	.089	1	.447 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.803	.211	.183	.063	.466	.381		.000
	N	99	99	99	99	99	99	99	99

Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas (keabsahan) atas instrumen penelitian menggunakan *Reliability Statistics Cronbach's Alpha* pada Tabel 3 dengan nilai diatas 0,6. Hasil perhitungan uji reliabilitas, varibel independen HRDQ (0,862), COMM (0,780), SUPT (0,839), dan variabel Independen TMLN (0,649). Kondisi ini menunjukkan variabel penelitian reliable karena di atas 0,6 seperti pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Scale: ALL VARIABLES			
Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	99	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	99	100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.			
Reliability Statistics			
	Cronbach's Alpha	N of Items	
	.649	7	

Sedangkan untuk hasil pengujian asumsi klasik yang disajikan adalah Uji Multikolinearitas menunjukkan nilai tolerance > 0,1 yaitu HRDQ (0,226), COMM (0,320), dan SUPT (0,248) dan nilai VIF <10 yaitu HRDQ (4,419), COMM (3,130), dan SUPT (4,027) sehingga disimpulkan tidak terjadi multikolenearitas pada model regresi seperti pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.682	.384		4.374	.000		
	Sumber Daya Manusia	.028	.168	.029	.165	.870	.226	4.419
	Komitmen Organisasi	.275	.149	.276	1.850	.067	.320	3.130
	Perangkat Pendukung	.283	.160	.298	1.761	.081	.248	4.027

a. Dependent Variable: Ketepatanwaktuan (Timeliness)

Uji Heteroskedastisitas menghasilkan nilai signifikansi diatas 0,05 yaitu HRDQ (0,870), COMM (0,067), dan SUPT (0,081) sehingga disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi seperti pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.682	.384		4.374	.000		
	Sumber Daya Manusia	.028	.168	.029	.165	.870	.226	4.419
	Komitmen Organisasi	.275	.149	.276	1.850	.067	.320	3.130
	Perangkat Pendukung	.283	.160	.298	1.761	.081	.248	4.027

a. Dependent Variable: Ketepatanwaktuan (Timeliness)

Uji Normalitas yang dapat dilakukan dengan dua pengujian yaitu: (a) berdasarkan grafik normal P-P plot of regression standardized residual yang menghasilkan titik-titik menyebar di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai residual tersebut normal, (2) Output atas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,868. Karena signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka nilai residual tersebut normal seperti pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.33359552
Most Extreme Differences	Absolute	.060
	Positive	.032
	Negative	-.060
Kolmogorov-Smirnov Z		.597
Asymp. Sig. (2-tailed)		.868

Selanjutnya dilakukan uji regresi linear seperti pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Uji Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF	
		B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	1.682	.384		4.374	.000			
	Sumber Daya Manusia	.028	.168	.029	.165	.870	.226	4.419	
	Komitmen Organisasi	.275	.149	.276	1.850	.067	.320	3.130	
	Perangkat Pendukung	.283	.160	.298	1.761	.081	.248	4.027	

a. Dependent Variable: Ketepatan Waktu (Timeliness)

Berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda, maka dapat disusun persamaan sebagai berikut:

$$Y = 1,682 + 0,028 X_1 + 0,275 X_2 + 0,283 X_3$$

Hipotesis atas variabel independen pertama yang diajukan terkait dengan Sumber daya manusia (HRDQ) berpengaruh terhadap ketepatan waktu (TMLN) Administrasi APBD dan pelaporan keuangan daerah. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu HRDQ (0,870). Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% maka semua H_0 diterima. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu (*timeliness*). Dengan demikian Hipotesis pertama (H_1) menyatakan Sumber Daya Manusia (HRDQ) berpengaruh terhadap ketepatan waktu (TMLN) Administrasi APBD dan pelaporan keuangan daerah tidak sejalan dengan hasil yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan (Jaenudin, 2019).

Sedangkan Hipotesis atas variabel independen yang diajukan terkait dengan Komitmen Organisasi, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, COMM (0,067). Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% maka semua H_0 diterima. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu (*timeliness*). Dengan demikian Hipotesis kedua (H_2) menyatakan Komitmen organisasi (COMT) berpengaruh terhadap ketepatan waktu (TMLN) Administrasi APBD dan pelaporan keuangan daerah tidak sejalan dengan hasil penelitian. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rachmawati, 2014), meskipun hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian (Rosalin, 2011).

Terkait dengan hipotesis atas variabel independen yang diajukan yaitu perangkat pendukung, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, dan SUPT (0,081). Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% maka semua H_0 diterima. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu (*timeliness*). Dengan demikian Hipotesis kedua (H_3) menyatakan Perangkat pendukung (SUPT) berpengaruh terhadap ketepatan waktu (TMLN) Administrasi APBD dan pelaporan keuangan daerah tidak sejalan dengan hasil penelitian. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa perangkat pendukung tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Jaya & Ruliaty, 2019).

Namun demikian dalam perhitungan uji anova menunjukkan nilai F hitung 15.104 lebih besar dari nilai F tabel 2,70 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel independen bebas X_1 , X_2 , dan X_3 (*secara simultan*) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y), serta dari output SPSS, diketahui nilai signifikansi sebesar 0,000 seperti pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Uji Anova

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.202	3	1.734	15.104	.000 ^a
	Residual	10.906	95	.115		
	Total	16.108	98			

a. Predictors: (Constant), Perangkat Pendukung, Komitmen Organisasi, Sumber Daya Manusia

b. Dependent Variable: Ketepatanwaktuan (Timeliness)

Karena nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F maka dapat disimpulkan pula bahwa X_1 , X_2 , dan X_3 (*secara simultan*) berpengaruh terhadap Y. Dengan demikian hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel Sumber daya manusia (HRDQ), komitmen organisasi (COMT), dan Perangkat pendukung (SUPT) secara simultan berpengaruh terhadap ketepatan waktu (TMLN) administrasi APBD dan pelaporan keuangan daerah. Dalam konteks ketepatan waktu pelaporan keuangan, pengujian variabel independen secara simultan dengan hasil yang mempengaruhi ketepatan waktu ini dilakukan oleh (Zulaikah, 2020).

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, menunjukkan keseluruhan hipotesis yang diajukan, artinya sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan perangkat pendukung tidak berpengaruh pada ketepatan waktu Administrasi APBD dan pelaporan keuangan daerah. Namun demikian dengan melihat penjabaran di atas, maka pengambilan keputusan dalam uji F baik itu membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel, maupun berpedoman pada nilai signifikansi diperoleh hasil yang sama pula atau hasil yang konsisten yaitu secara simultan berpengaruh pada ketepatan waktu (*timeliness*).

Penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya mengambil time frame masa pandemi Covid-19. Penelitian pada kondisi turbulensi Covid-19 yang mempengaruhi keuangan daerah akan memberikan wawasan yang lebih luas dalam memahami APBD.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah memberikan dukungan dalam bentuk pendampingan dalam penelitian ini sehingga dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Akbal, M. (2016). Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Supremasi*, XI(2), 99-107. <http://103.76.50.195/supremasi/article/view/2800/1505>
- Eristanti, A., Dwi, B., & Putra, I. N. N. A. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 91-104. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v1i2.7>
- Gagola, L., Sondakh, J., & Warongan, J. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 108-117. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15330>
- Jaenudin, J. (2019). Pengaruh Kompetensi Sdm Dan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Serta Pengaruhnya Pada Kinerja Keberlanjutan Keuangan (Studi Pada Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (Pkbi)). *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3(1), 1-26. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i1.4098>
- Jaya, A. I., & Ruliaty. (2019). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Ketepatan Waktupenyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Polewali Mandar. *Competitiveness*, 8, 135-148. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/competitiveness/article/download/4428/pdf>
- Kemenkeu. (2021). *Mendagri Minta Pemda Segera Realisasikan Belanja APBD 2021*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/mendagri-minta-pemda-segera-realisasikan-belanja-apbd-2021/>
- Kusuma Negara, P., Handajani, L., & Effendy, L. (2018). Studi Kasus Fenomena Tingkat Serapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 19(1), 76-91. <https://doi.org/10.18196/jai.190193>
- McDonald, B. D. (2017). *Measuring the Fiscal Health of Municipalities* (Issue Lincoln Institute of Land Policy).
- Mu'am, A. (2015). Basis Akrua dalam Akuntansi Pemerintah di Indonesia. *Jurnal Lingkar Widyaaiswara*, 2(1), 38-46. http://juliwi.com/published/E0201/Paper0201_38-46.pdf
- Pamungkas, B. (2012). Pengaruh Penerapan Akuntansi Publik Dan Kualitas Peraturan Perundangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen Ranggagading*, 12(1), 1-10.
- Purwanto, A. (2016). Pengaruh Kondisi Keuangan Dan Politik Terhadap Perubahan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 16(2), 87-96.
- Rachmawati, A. (2014). *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan*. Naskah Publikasi-Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. http://eprints.ums.ac.id/32082/9/NASKAH_PUBLIKASI.pdf
- Riyanto, A. (2012). Politik Anggaran Provinsi Jawa Tengah: Analisis Realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2008-2010. *Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*, 12(2), 1-14.

- Ropii, I. (2015). Pola Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Daerah (Konsepsi Dan Dinamikanya). *Maksigama*, 9(1), 34–51. <https://doi.org/10.37303/v9i1.4>
- Rosalin, F. (2011). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi pada BLU di Kota Semarang)*. Skripsi-Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. <http://eprints.undip.ac.id/29439/>
- Safitri, D. (2017). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 174–189.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (ed.); Kedua). Bandung: Alfabeta.
- Suspitasari, Mas'ad, & Ali, I. (2018). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Kegiatan Tambak Udang Di Desa Tambak Sari Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. *GEOGRAPHY: Jurnal Kajian Penelitian & Pengembangan Pendidikan*, 6(2), 14–18. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/geography/article/view/1418>
- Widianingrum, D., Kustono, A. S., & Suryaningsih, I. B. (2017). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Kabupaten Situbondo. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 11(2), 194–208. <https://doi.org/10.19184/bisma.v11i2.6314>
- Zulaikah. (2020). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu (Timeliness) Pelaporan Keuangan Publikasi Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2014-2018*. Naskah Ilmiah - Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://eprints.ums.ac.id/83163/19/naskah publikasi %2884%29.pdf>